

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Batam

Penelitian Relasi Kerjasama Antara Badan Pengusahaan Batam dan PT Adhya Tirta Batam dalam Pengelolaan Air Bersih di Kota Batam Tahun 2019-2020 dilakukan di Kota Batam, Kepulauan Riau. Deskripsi wilayah penelitian berfungsi memberikan gambaran mengenai keadaan geografis dan keadaan wilayah Kota Batam serta memberikan deskripsi mengenai perusahaan dan instansi yang diteliti.

2.1.1 Keadaan Geografis

Terletak di antara Singapura dan Selat Malaka, termasuk dalam daerah Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Batam adalah salah satu dari 329 pulau yang membentuk wilayah Kota Batam secara keseluruhan. (bpbatam.go.id n.d. diakses 29/05/2021). Luas wilayah dataran sejumlah 1.038,84 km² dan luas wilayah perairan sebesar 2.791,09 km² Kota Batam menjadi kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau (Badan Pusat Statistik Kota Batam, hal 5, 2019).

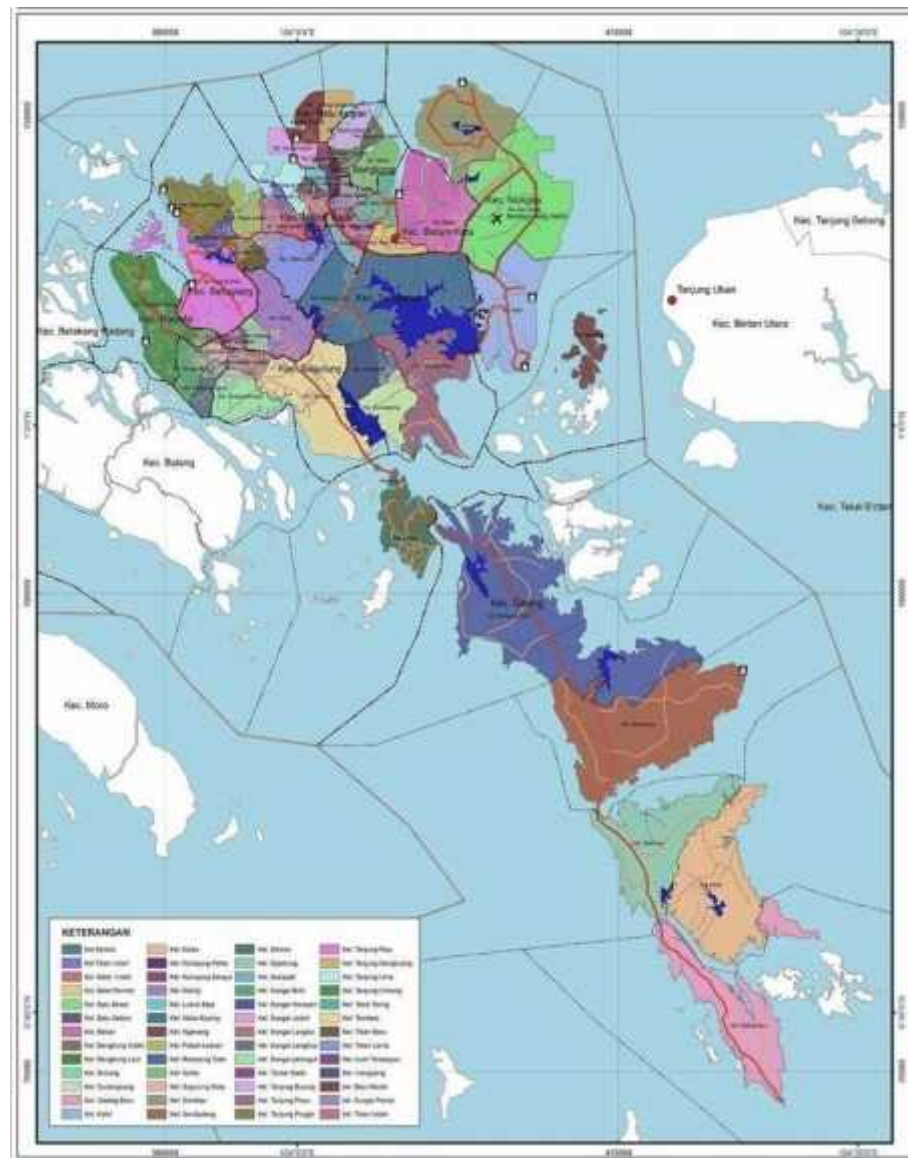
Kota Batam memiliki topografi yang berbukit, dengan ketinggian tertinggi 160 meter dpl. Tanahnya didominasi oleh jenis tanah bauksit berwarna merah yang kurang subur, dan cuacanya cenderung fluktuatif. Kondisi tersebut mengakibatkan vegetasi yang cocok untuk pertanian di

daerah ini adalah jenis spesies yang mampu tumbuh tanpa harus mengikuti musim.

Kawasan Kota Batam terdiri dari beberapa pulau, termasuk Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, yang terhubung oleh Jembatan Bareleng. Selain itu, terdapat juga pulau-pulau kecil lainnya di sekitar Selat Singapura dan Selat Malaka. Secara keseluruhan, Kota Batam memiliki total 371 pulau dalam wilayahnya.

Kota Batam memiliki suhu minimum 20-23,6 derajat celcius dan suhu maksimum 32,4-34,6 derajat celcius, sehingga suhu Kota Batam sepanjang tahun memiliki rata-rata 27-27,9 derajat celcius. Kota Batam memiliki kelembaban udara antara 80,52%-85,84%. Umumnya, musim hujan di Kota Batam berlangsung dari November hingga April, sementara musim kemarau berlangsung mulai dari Mei hingga Oktober. Curah hujan tahunan di Kota Batam mencapai sekitar 2600 mm per tahun.

Gambar 2.1 Peta Kota Batam



Sumber: bpbatam.go.id

2.1.2 Kondisi Demografi

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam menyebutkan pada tahun 2015 populasi penduduk Batam mencapai angka 1.037.187 orang (www.dukcapil.kemendagri.go.id diakses 29/05/2021). Kemudian pada tahun 2018 penduduk Kota Batam terhitung sebanyak

1,329,773 jiwa, yang terdiri atas 651.705 orang perempuan dan 678.068 orang pria (Badan Pusat Statistik, hal 56, 2019). Kecamatan Sagulung adalah daerah dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu sejumlah 275,259 jiwa, dan Kecamatan Bulang dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sejumlah 10,012 jiwa.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Batam Kota	135,339	136,115	271,454
2	Batu Aji	97,781	90,007	187,788
3	Batu Ampar	34,703	32,191	66,894
4	Belakang Padang	9,740	9,647	19,387
5	Bengkong	54,695	55,171	109,866
6	Bulang	5,286	4,726	10,012
7	Galang	8,454	7,389	15,843
8	Lubuk Baja	43,459	43,790	87,249
9	Nongsa	35,317	31,685	67,002
10	Sagulung	148,565	126,694	275,259
11	Sekupang	67,091	63,910	131,001

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
12	Sungai Beduk	37,638	50,380	88,018
	Kota Batam	678,068	651,705	1,329,773

Sumber: Kota Batam Dalam Angka 2019, Badan Pusat Statistik, Hal 56

Kepadatan penduduk Kota Batam yaitu sebesar 1.280 jiwa/km³. Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 2, penyebaran penduduk Kota Batam tidak merata, dimana daerah yang berada di kawasan Pulau Batam memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang berada di luar Pulau Batam. Hal ini dapat dilihat dengan Kecamatan Bengkong sebagai kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 8317 jiwa/km³, disusul Kecamatan Lubuk Baja dan Batam Kota, sementara Kecamatan Galang dan Kecamatan Bulang yang berada di luar Pulau Batam memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah dengan 45 jiwa/km³ untuk Kecamatan Galang dan 63 jiwa/km³ untuk Kecamatan Bulang.

Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk Kota Batam per Kecamatan Tahun 2018

NO	Nama Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ³)
1	Batam Kota	20,41	6,968
2	Batu Aji	14,12	4,543
3	Batu Ampar	5,03	5,978

NO	Nama Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ³)
4	Belakang Padang	1,46	280
5	Bengkong	8,26	8,317
6	Bulang	0,75	63
7	Galang	1,19	45
8	Lubuk Baja	6,56	7,633
9	Nongsa	5,04	585
10	Sagulung	20,70	5,025
11	Sekupang	9,85	1,918
12	Sungai Beduk	6,62	827
Kota Batam		100,00	1,280

Sumber: Kota Batam Dalam Angka 2019, Badan Pusat Statistik, Hal 58

Proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik untuk periode 2010-2035 menunjukkan bahwa Kota Batam mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 3,63% setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk di Kota Batam telah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi sejak awal pembangunannya pada tahun 1973.

2.1.3 Keadaan Ekonomi

Berikut adalah tabel pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tiga tahun terakhir berdasarkan Kategori Lapangan Kerja.

Tabel 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam pada Tiga Tahun Terakhir (2018-2020)

Jenis Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam (dalam Persen)		
	2018	2019	2020
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	8.31	1.08	12.23
Air, Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	3.14	7.23	-2.83
Akomodasi dan Makan Minum	10.18	9.62	-45.49
Industri Pengolahan	3.50	7.00	3.78
Informasi dan Komunikasi	12.85	11.97	18.09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.70	2.10	-2.09
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.09	4.94	-1.18
Jasa Lainnya	16.82	1.97	-67.98
Jasa Pendidikan	2.27	0.71	-5.96
Jasa Perusahaan	7.19	-8.74	-43.33
Konstruksi	8.23	6.92	-6.98
Listrik dan Gas	-1.02	4.23	-2.67
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.92	4.49	-14.73
Pertambangan dan Penggalian	-1.78	1.43	-3.64

Jenis Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam (dalam Persen)		
	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.72	6.06	-0.47
Real Estate	-5.13	2.10	-16.74
Transportasi dan Pergudangan	1.43	-17.02	-44.52
PDRB KOTA BATAM	4.96	5.92	-2.55

Sumber: batamkota.bps.go.id

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam secara umum mengalami tren penurunan seperti yang tertera pada tabel diatas. Sektor Pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta pada sektor akomodasi dan air minum terlihat penurunan yang drastis. Secara umum, penurunan juga terjadi pada sektor lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pandemi covid 19 yang menyebabkan tren perekonomian menurun.

2.1.4 Pemerintahan Kota Batam

Batam adalah bagian dari wilayah perdagangan bebas khusus Batam-Bintan-Karimun (BKK). Informasi mengenai sejarah Batam sangat terbatas karena sedikit sekali tulisan yang mencatat keberadaannya di masa lampau. Traktat London merupakan satu satunya berkas yang menyebutkan nama Batam. Berkas ini dibuat pada tahun 1824 untuk mengatur wilayah kekuasaan Inggris dan Belanda (*Anglo-Dutch Treaty, Article XII, 1824*).

Batam dikembangkan menjadi basis logistik pada tahun 1970 oleh Pertamina guna industri minyak dan gas bumi (bpbatam.go.id, n.d). Pembangunan Batam kemudian dipercayakan kepada Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam (Otorita Batam) yang pada tahun 2007 diganti dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Sementara Pemerintah Kota Batam didirikan pada 24 Desember 1983 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1983. Pada periode tersebut, kepemimpinan pemerintahan dijalankan oleh walikota dengan kedudukan yang setara dengan Kabupaten/Kota di daerah lain tingkat II, dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah Tingkat I yakni Gubernur Kepulauan Riau I.

Pembentukan Kota Batam dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan masyarakat dan mempercepat pembangunan wilayah, sebagai respons terhadap perkembangan Pulau Batam yang telah menjadi daerah industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata.

2.1.4.1 Pemerintah Kota Batam (PEMKO Batam)

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Kotamadya Batam Diresmikan sebagai Wilayah Administratif dibentuk seiring dengan perkembangan dan kemajuan wilayah Batam sebagai daerah industri. Awalnya, Kotamadya Batam merupakan bagian dari Provinsi Riau, kemudian pada tahun 2002, sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam resmi menjadi bagian Provinsi baru ini.

Gambar 2.2 Logo Pemerintah Kota Batam



Sumber: batam.go.id

Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Perubahan dan Pembentukan Kecamatan, menyebutkan Kota Batam memiliki 12 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam

Kec. Belakang Padang	Kec. Batu Aji	Kec. Sekupang	Kec. Sagulung
Kel. Tanjung Sari	Kel. Bukit Tempayan	Kel. Tanjung Riau	Kel. Tembesi
Kel. Sekanak Raya	Kel. Buliang	Kel. Tiban Indah	Kel. Sungai Binti
Kel. Pemping	Kel. Kibing	Kel. Patam Lestari	Kel. Sungai Lekop
Kel. Pulau Terong	Kel. Tanjung Uncang	Kel. Tiban Baru	Kel. Sagulung Kota

Kel. Pecong Kel. Kasu		Kel. Tiban Lama Kel. Sungai Harapan Kel. Tanjung Pinggir	Kel. Sungai Langkai Kel. Sungai Pelunggut
Kec. Sungai Beduk	Kec. Batu Ampar	Kec. Bengkong	Kec. Nongsa
Kel. Tanjung Piayu Kel. Duriangkang Kel. Mangsang Kel. Mukakuning	Kel. Tanjung Sengkuang Kel. Sungai Jodoh Kel. Batu Merah Kel. Kampung Seraya	Kel. Bengkong Laut Kel. Bengkong Indah Kel. Sadai Kel. Tanjung Buntung	Kel. Kabil Kel. Sambau Kel. Batu Besar Kel. Ngenang
Kec. Batam Kota	Kec. Lubuk Baja	Kec. Galang	Kec. Bulang
Kel. Teluk Kering Kel. Taman Baloi Kel. Sukajadi Kel. Belian Kel. Sungai Panas Kel. Baloi Permai	Kel. Kampung Pelita Kel. Batu Selicin Kel. Lubuk Baja Kota Kel. Tanjung Uma Kel. Baloi Indah	Kel. Sijantung Kel. Karas Kel. Sembulang Kel. Subang Mas Kel. Rempang Cate Kel. Air Raja Kel. Pulau Abang	Kel. Pulau Buluh Kel. Bulang Kel. Setokok Kel. Batu Legong Kel. Pantai Gelam Kel. Temoyong
		Kel. Galang Baru	

Sumber: Kota Batam Dalam Angka 2019, Badan Pusat Statistik, Hal 25-27

Tugas PEMKOT Batam meliputi pengurusan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, serta pengelolaan sumber daya manusia. Saat ini Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021 dijabat oleh Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad.

2.1.4.2 Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)

Pembangunan Batam diatur oleh lembaga pemerintah bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam (Otorita Batam). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2007, Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam (Otorita Batam) telah dialihkan kepada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), dan semua aset yang dimiliki oleh Otorita Batam telah menjadi aset BP Batam.

Gambar 2.3 Logo Badan Pengusahaan Batam



Sumber: bpbatam.go.id

BP Batam memiliki tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Adapun fungsi BP Batam yaitu:

1. Merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan terkait pembangunan, pengelolaan dan pengembangan di Batam.
2. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan implementasi kebijakan terkait pengembangan, pembangunan dan pengelolaan Batam.

3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Membina administrasi dan aparatur terkait.
5. Melaksanakan pengelolaan penanaman modal.
6. Melaksanakan kegiatan lalu lintas barang.
7. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana.
8. Melaksanakan kegiatan pengelolaan sarana perhubungan laut (pelabuhan) dan udara (bandar udara).
9. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

Visi BP Batam adalah memberikan kontribusi dalam meningkatkan investasi sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sejalan dengan visi presiden dan wakil presiden. Kemudian misi BP Batam yaitu:

1. Melakukan pencarian investasi asing untuk mendukung ekonomi produktif.
2. Memberikan dukungan dan fasilitas demi pengembangan investasi berorientasi ekspor.
3. Menyelenggarakan pelayanan investasi yang efektif dan efisien di Batam.
4. Meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung investasi di Batam.

5. Meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan di Batam.
6. Menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Batam.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (PEMKO Batam) bekerja sama dalam pemerintahan Kota Batam, namun, terhitung tanggal 17 September 2019, pemerintahan Kota Batam mengakhiri dualisme pemerintahan yang ditandai dengan diberikannya kepemimpinan BP Batam kepada Pemerintahan Walikota Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

2.2 Gambaran Kerjasama Pengelolaan Air Bersih di Kota Batam

Perusahaan penyedia air bersih adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pengadaan, penyaringan, pelayanan, dan distribusi langsung air bersih kepada pelanggan menggunakan pipa atau tangki mobil. Pelanggan tersebut meliputi rumah tangga, industri, dan konsumen lainnya. Tujuan perusahaan ini adalah tujuan komersil. Dalam konteks penelitian ini, perusahaan air yang dimaksud adalah PT Adhya Tirta Batam (PT ATB).

2.2.1 PT Adhya Tirta Batam

PT Adhya Tirta Batam (PT ATB) merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing. Kemudian, PT ATB telah diberikan peran eksklusif di Pulau Batam untuk melakukan pengambilan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber air mentah guna memproduksi air layak pakai, serta mendistribusikannya kepada pengguna di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) Nomor 062/UM-KPTS/XI/1995 mengenai Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam oleh PT Adhya Tirta Batam.

Gambar 2.4 Logo PT Adhya Tirta Batam (PT ATB)



Sumber: atbbatam.com

Pada 1996 jumlah pengguna sejumlah 20.349. Tahun 2019, jumlah pengguna yang teraliri air bersih ATB kini sejumlah 289.815. Selain itu, jangkauan pelayanan PT ATB juga naik secara drastis. Tahun 1996,

cakupan pelayanan ATB hanya sejumlah 36 persen dan pada tahun 2019 persentase pelayanan meningkat menjadi 99,7 persen. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah masyarakat Kota Batam. Pada tahun 1996, penduduk Batam sejumlah 247.958 jiwa, kini penduduk Batam mencapai 1,329,773 jiwa. Dalam hal kebocoran, PT ATB pada tahun 1996, memiliki tingkat kebocoran sejumlah 46 persen dan pada tahun 2019 tingkat kebocoran ATB adalah 14 persen.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Batam pada tahun 2019, berikut adalah jumlah pelanggan, volume (m³) dan nilai (Rp Juta) air bersih yang didistribusikan PT Adhya Tirta Batam berdasarkan jenis tempat penyaluran pada tahun 2018.

Tabel 2.5 Jumlah Pelanggan volume (m³) dan nilai (Rp Juta) air bersih yang didistribusikan PT Adhya Tirta Batam menurut jenis penyaluran pada tahun 2018

Jenis Penyaluran	Pelanggan	Volume (m ³)	Nilai (Rp Juta)
Rumah Tempat Tinggal dan Instansi Pemerintah	232,447	56,454,811	256,498
Industri	2,383	6,351,310	70,312
Badan Sosial, Rumah Sakit dan Tempat Peribadatan	1,892	4,976,158	13,145

Jenis Penyaluran	Pelanggan	Volume (m3)	Nilai (Rp Juta)
Niaga (termasuk Hotel, pariwisata)	30,052	12,153,066	145,850
Pelabuhan dan Bandara	47	279,741	8,161
Jumlah	266,821	80,215,086	493,966

Sumber: Kota Batam Dalam Angka 2019, Badan Pusat Statistik, Hal 196

2.2.2 Pengelolaan Air di Kota Batam

Sejak dimulainya proses pembangunan dan pengembangan Kota Batam pada tahun 1971, pemerintah, yang diwakili oleh Otorita Batam (BP Batam), telah bertanggung jawab dalam penyediaan dan pengelolaan air bersih. Sejalan dengan meningkatnya permintaan di pasar, pemerintah bekerjasama dengan PT Adhya Tirta Batam menggunakan kontrak konsesi pengelolaan air layak pakai selama 25 tahun, yang berlaku mulai tahun 1995 hingga 2020.

Sejak dimulainya kerjasama antara PT Adhya Tirta Batam dan Otorita Batam/BP Batam pada tahun 1995 hingga tahun 2020, pengelolaan dan penyaluran air bersih di Kota Batam telah mengalami banyak perubahan. Selama 25 tahun menjalin kerja sama pengolahan, distribusi

hingga peningkatan kualitas air dan pelayanan kepada pelanggan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Cakupan pelayanan PT ATB setahun setelah dimulainya konsesi yaitu tahun 1996 hanya sejumlah 36%, jumlah ini meningkat jauh jika dibandingkan dengan cakupan pelayanan tahun 2019 yaitu sejumlah 99,7%. Hal ini juga diikuti dengan meningkatnya jumlah pelanggan, dari sejumlah 20.349 pelanggan di tahun 1996, menjadi 289,815 pelanggan di tahun 2019.

Berikut adalah jumlah pelanggan dan air yang disalurkan pada tahun 2019-2020:

Tabel 2.6 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan pada Tahun 2019-2020

Kecamatan	Pelanggan dan Air yang Disalurkan Berdasarkan Kecamatan			
	Pelanggan		Air Disalurkan (m ³)	
	2019	2020	2019	2020
Batam Kota	66365	66353	20860153	3462625
Batu Aji	36882	36888	9727682	1652610
Batu Ampar	8785	8492	4367625	691009
Belakang Padang	-	-	-	-
Bengkong	12752	18357	4303321	1101222
Bulang	-	-	-	-
Galang	-	-	-	-
Lubuk Baja	18460	17260	8126008	1182639

Kecamatan	Pelanggan dan Air yang Disalurkan Berdasarkan Kecamatan			
	Pelanggan		Air Disalurkan (m ³)	
	2019	2020	2019	2020
Nongsa	17948	19086	7764565	1279414
Sagulung	50401	51256	13412443	2299597
Sekupang	43014	43281	10414979	1865392
Sungai Beduk	20866	21832	7039277	1047231
KOTA BATAM	275472	282805	86016052	14581739

Sumber: batamkota.bps.go.id

Berikut adalah nilai air per kecamatan pada tahun 2019-2020

Tabel 2.7 Nilai Air Per Kecamatan Pada Tahun 2019-2020

Kecamatan	Nilai Air yang disalurkan berdasarkan Kecamatan (Rp Juta)	
	2019	2020
Batam Kota	148629	24589
Batu Aji	49956	8667
Batu Ampar	37542	5698
Belakang Padang	-	-
Bengkong	24373	6372
Bulang	-	-
Galang	-	-
Lubuk Baja	66944	9651
Nongsa	59247	9043

Kecamatan	Nilai Air yang disalurkan berdasarkan Kecamatan (Rp Juta)	
	2019	2020
Sagulung	64804	11486
Sekupang	54787	9764
Sungai Beduk	40952	5095
KOTA BATAM	547234	90364

Sumber: batamkota.bps.go.id

Peningkatan jumlah cakupan dan pelanggan juga diikuti dengan peningkatan jumlah kapasitas produksi yang semula sejumlah 500 l/d (1996) menjadi 3.610 l/d (2019). Selain kapasitas produksi tingkat Non-revenue Water (NRW) juga mengalami perubahan. Non-revenue Water (NRW) adalah jumlah air yang telah diproduksi dan “hilang” sebelum air tersebut sampai ke pelanggan. Sebab dari hilangnya sejumlah air ini dapat berupa (Frauendorfer, 2010. Hal. 5-6):

1. Kehilangan fisik (*Physical loss*), terdiri atas kebocoran dan tumpahan air dari sistem serta fasilitas penyimpanan maupun distribusi air. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan operasional dan pemeliharaan yang buruk
2. Kehilangan Komersial (*Commercial Loss*), terdiri atas kehilangan air akibat kesalahan penanganan data, dan pencurian air dalam bentuk apapun.
3. Konsumsi tanpa tagihan (*Unbilled authorized consumption*), terdiri air yang digunakan untuk keperluan operasional, seperti

air yang digunakan pemadam kebakaran, dan air yang disediakan secara gratis untuk kelompok konsumen tertentu.

Selama 25 tahun beroperasi PT ATB berhasil mengurangi angka NRW dari 46% pada tahun 1996, menjadi 14% di tahun 2019. Menurut World Bank angka ideal untuk NRW adalah kurang dari 25%. Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa pertumbuhan penduduk Kota Batam yang cepat juga mengakibatkan tingginya permintaan kebutuhan air.

Muhammad Rudi selaku Ketua BP Batam pada Januari 2020 menyatakan bahwa BP Batam tidak akan memperpanjang kontrak pengelolaan air baku dengan PT ATB (Batam.Tribunnews.com, 23/01/2020, diakses 21 April 2020). Rudi juga memutuskan kedepannya pengelolaan air di Batam akan dikelola oleh BP Batam sendiri (Batampos.co.id, 24/01/2020, diakses 22 April 2020). Namun pada tanggal 14 September 2020, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melakukan penandatanganan kerjasama pengelolaan air bersih dengan PT Moya, perusahaan yang memenangkan tender lelang, menggantikan PT Adhya Tirta Batam (batampos.co.id, 14/09/2020, diakses 14 September 2020).